



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun ke depan guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, Renstra ini melibatkan berbagai unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan serta stakeholder terkait secara partisipatif. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja dinas sebagai pengelola teknis program dan kegiatan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga di Kota Pekalongan. Semoga penyusunan dan implementasi Renstra ini mendapatkan ridho Allah SWT serta dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Kota Pekalongan



M. TAUFUQU ROCHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I

NIP. 19780107 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
2.1.5. Mitra PD dalam memberikan Pelayanan	21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	21
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.2.2. Isu – isu Strategis.....	23
2.2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029.....	26
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029	28
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	29
3.4 Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	31
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	34
4.1 Uraian Program.....	34
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	34

4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
	
BAB V	PENUTUP	47
	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon/Jabatan	14
Tabel II.2 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon/Jabatan	14
Tabel II.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15
Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	16
Tabel II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19
Tabel II. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	22
Tabel III.1 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	27
Tabel III.2 Target Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	29
Tabel III.3 Strategi Renstra PD.....	30
Tabel III.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	31
Tabel IV.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	35
Tabel IV.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
Tabel IV.3 Indikator Utama Pembangunan	44
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama PD	45
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci.....	45
Tabel IV.6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	45
Tabel IV.7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan dan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2025-2029 serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan teknokratis, berbasis logic model, sistem berpikir, serta sistem dinamik agar dapat menghasilkan perencanaan yang rasional, operasional, efektif, dan akuntabel.

Sebagai kota yang dikenal dengan pluralisme dan heterogen, Kota Pekalongan memiliki keberagaman budaya, suku, agama, ras yang merupakan potensi besar dalam pembangunan jika dimanfaatkan secara optimal. Namun hal tersebut juga merupakan tantangan terbesar dan sangat rentan terhadap terjadinya konflik sosial dan masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik maka sangat mungkin justru dapat menghambat proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang - undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana :Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan disusun bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi Walikota Pekalongan serta tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPd dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan untuk periode 2025-2029.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan urgensi penyusunan RENSTRA sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, guna mendukung pembangunan Kota Pekalongan dalam lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RENSTRA, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tujuan utama penyusunan RENSTRA, yakni sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memastikan kesinambungan program yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dan isi dokumen RENSTRA, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan peran dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembangunan daerah, termasuk struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
Menjelaskan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pendukung.
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menganalisis capaian dan efektivitas pelayanan yang telah diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi target layanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari :
- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029, Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025, Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 –2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekalongan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Pelayanan yang diberikan oleh Bakesbangpol mencakup berbagai aspek khususnya dalam pembinaan ideologi pancasila, kesatuan bangsa, pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan yang semuanya bertujuan guna terwujudnya kondusivitas wilayah khususnya di Kota Pekalongan yang mampu mendorong dan mendukung peningkatan investasi dan perekonomian di Kota Pekalongan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 96 TAHUN 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tugas :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

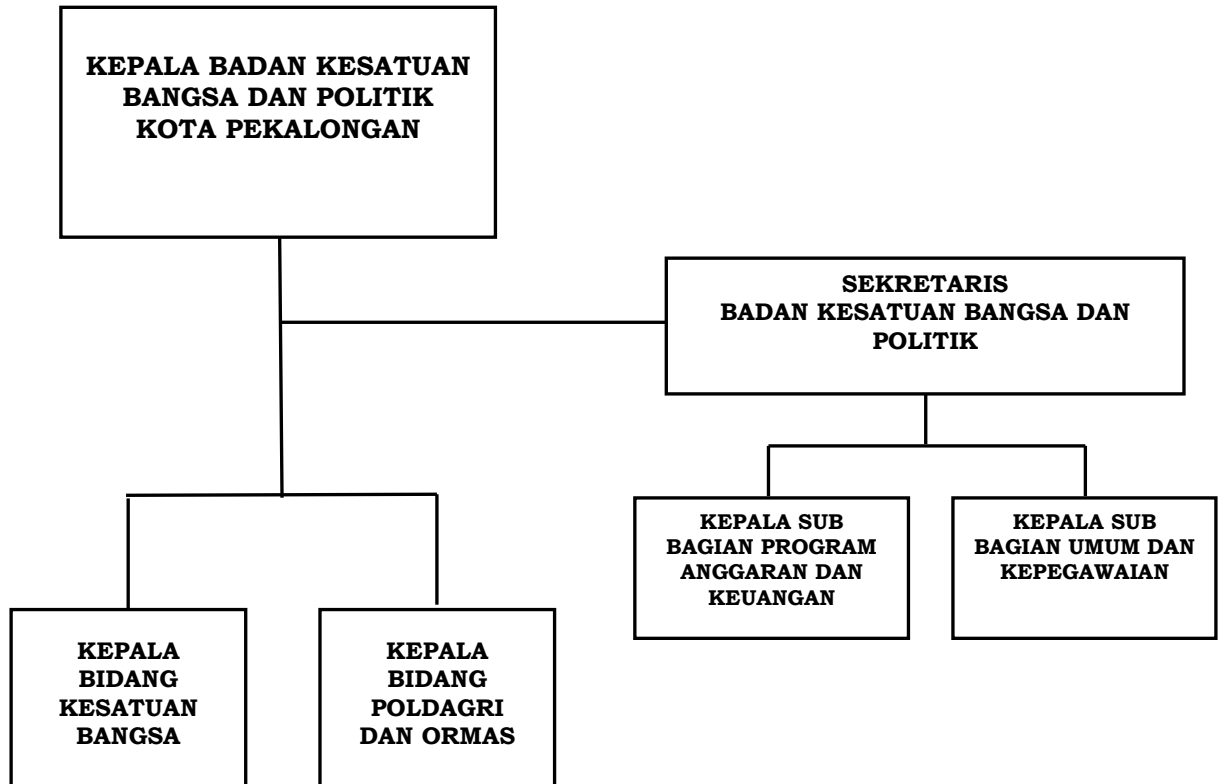
Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan sasaran serta program bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 8) Penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 10) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/atau standar pelayanan (sp);
- 11) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan 30 Juni 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan memiliki 29 pegawai yang terdiri dari 14 orang ASN dan 15 orang Non ASN. Dari 14 orang ASN tersebut terdapat 12 orang laki laki dan 2 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Tingkat Pendidikan				Gender		Total
		S2	S1	D3	SLTA	L	P	
I	PNS							
1.	Eselon III	3				3		3
2.	Eselon IV	1		1		2		2
3.	Staf		5		4	7	2	9
II	Tenaga Kegiatan		3	3	9	10	5	15
Jumlah		4	8	4	13	22	7	29

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, Juli 2025

Tabel II.2 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Berdasarkan Eselon/Jabatan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPK	NON ASN	
1	Sekretariat	1	3	1	1	10	16
2	Poldagri dan Ormas	1	2	1	0	2	6
3	Kesatuan Bangsa	1	2	1	0	3	7

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, Juli 2025

Sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas pegawai, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Fasilitas seperti gedung perkantoran, peralatan teknologi informasi, kendaraan operasional, dan sistem pendukung lainnya harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

Dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dapat lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, perhatian terhadap sarana dan prasarana bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga bagian strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada hasil.

Tabel II.3 Jumlah Sarana dan Prasarna Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Dinas	10	Unit
2	Personal Computer	8	Unit
3	Laptop	4	Unit
4	Printer	6	Unit
5	AC	10	Unit
Jumlah		38	Unit

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam kondusivitas wilayah guna mewujudkan stabilitas keamanan, politik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selama periode perencanaan 2021-2025, berbagai capaian telah diraih, terutama dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, seperti keterbatasan infrastruktur, keterjangkauan akses, serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat menghambat.

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Lain	Satuan	Target Renstra					Capaian Renstra					Rasio Capaian				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Nihil	Nihil	Nihil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan																		
5	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Lembaga	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	95,65	90,48	100	100	100	95,65	90,48	100	100	100
7	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel II.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target. Namun, di sisi lain, terdapat satu sektor yang sedikit mengalami kendala dalam pencapaian target, yakni jumlah ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan. Faktor-faktor yang menghambat pencapaian ini antara lain kurangnya peran serta ormas dan kesiapan ormas dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu adanya peningkatan pembinaan ormas.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan di periode mendatang. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kondusivitas wilayah dan peningkatan pendidikan politik dan kesatuan bangsa di Kota Pekalongan.

Tabel II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	18.500.000	1.564.021.000	1.497.756.000	1.659.130.000	1.540.520.000	18.500.000	1.322.408.408	1.441.982.035	1.582.490.311	1.529.291.000	100	84,55	97,77	95,38	99,27	6,82	2,17
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200.321.000	163.590.000	356.762.000	391.693.000	9.510.789.000	200.321.000	153.472.529	352.045.264	379.958.697	9.386.146.092	100	93,82	94,69	97,00	98,69	6,94	15,87
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	65.874.000	24.144.000	1.098.593.000	57.479.000	1.557.098.000	65.874.000	22.959.500	1.082.722.000	53.946.962	1.535.975.000	100	95,09	98,56	93,86	98,64	0,97	39,26
4	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	685.920.000	690.316.000	690.316.000	1.736.749.000	1.894.489.000	573.705.000	605.288.693	425.718.184	1.682.920.630	1.845.450.272	84,00	87,68	68,66	96,90	97,41	18%	53,67
5	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	299.867.000	960.740.000	27.000.000	7.046.372.000	11.408.080.000	210.579.000	845.437.800	26.440.000	7.022.927.891	11.390.430.783	70,00	97,00	97,93	99,67	99,85	122,4	0,31
6	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	0	405.000.000	1.298.500.000	605.000.000	379.352.000	0	405.000.000	1.273.644.968	575.000.000	374.279.724	-	100	98,09	95,04	98,66	1,13	5,87
7	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0	208.775.000	4.627.311.000	462.403.000	162.207.000	0	161.803.900	4.254.545.870	461.412.163	150.218.418	-	77,50	91,94	99,79	92,61	32,09	-0,17

8	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	0	186.520.000	1.118.522.000	83.057.000	325.900.000	0	182.017.000	1.028.244.988	81.535.300	278.692.000	-	97,59	91,93	98,17	85,51	0,87	2,18
---	---	---	-------------	---------------	------------	-------------	---	-------------	---------------	------------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	------	------

Dari tabel II.5 yang tersaji dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya data rasio antara realisasi dan anggaran mengungkapkan kinerja yang bervariasi dari tahun ke tahun. Rasio ini menandakan bahwa realisasi anggaran mendekati target yang ditetapkan, mencerminkan pencapaian yang solid.

Kinerja yang baik juga terlihat pada pembinaan pelestarian sejarah, di mana rasio hampir mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa pencapaian anggaran sangat mendekati target yang ditentukan dan menunjukkan hasil yang positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini sangat beragam. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif merupakan faktor kunci. Keterlibatan stakeholder dalam merancang dan menjalankan program sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil.

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang ada juga sangat diperlukan untuk memperbaiki kekurangan di masa mendatang.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat Kota Pekalongan, Organisasi Kemasyarakatan Kota Pekalongan, Lembaga – lembaga Pendidikan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kesukuan, Partai Politik di Kota Pekalongan, Forum – forum Komunikasi Daerah Di Kota Pekalongan, TNI, POLRI, BNN, BIN, BAIS, Kantor Imigrasi dan beberapa Stakeholder lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama – sama dengan Stakeholder terkait bertanggung jawab atas kondusivitas Wilayah di Kota Pekalongan dan memastikan berjalannya pemerintahan dan layanan kepada masyarakat tanpa adanya gangguan dari manapun.

2.1.5. Mitra PD dalam memberikan Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan bekerjasama dengan banyak Stakeholder terkait, diantaranya adalah KPU dan Bawaslu.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan meliputi Sumberdaya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumberdaya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian seluruh tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan:

Tabel II. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya upaya pemantapan stabilitas sosial dan politik daerah	1. Masih rendahnya akurasi data keberadaan dan perkembangan ormas	a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengawasan ormas
		b. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pendataan keberadaan ormas
		c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi sasaran pengawasan ormas
		d. Belum terintegrasinya sistem pengawasan ormas dengan Instansi terkait
		e. Belum optimalnya peran FPK dan FKUB
	2. Belum optimalnya upaya cegah tangkal dan kewaspadaan dini potensi konflik	a. Belum adanya SOP penerapan sistem cegah tangkal dan kewaspadaan dini potensi konflik
		b. Belum tersedianya akurasi data dan pemetaan wilayah potensi konflik
		c. Kurangnya kapasitas aparat yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis intelijen
		d. Belum optimalnya koordinasi kewaspadaan dini potensi konflik
		e. Belum optimalnya peran KOMINDA
	3. Belum optimalnya upaya pendidikan ideologi dan	a. Belum optimalnya koordinasi dengan Partai Politik

	politik	b. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sasaran
		c. Belum terintegrasinya pelaksanaan pendidikan politik dengan <i>stakeholder</i> terkait
		d. Belum optimalnya pemberdayaan ormas dan lembaga lainnya dalam upaya pendidikan ideologi dan politik

2.2.2. Isu – isu Strategis

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan perlu merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada periode 2025-2029. Isu strategis ini mencerminkan aspek-aspek utama yang harus mendapatkan perhatian guna mewujudkan pengelolaan sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan ke depan adalah:

1. Penguatan SDM Forum-Forum Strategis Masyarakat, Keluarga, Sekolah, Lembaga pendidikan dan Media massa
2. Penguatan sistem deteksi dini konflik berbasis masyarakat
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA
4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan kondusivitas wilayah
5. Peningkatan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA

Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan untuk lima tahun ke depan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa strategi yang dirancang dapat menjawab permasalahan yang ada, sementara peluang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kota Pekalongan yang sangat luas yang berada di tengah – tengah pulau Jawa dan merupakan kota budaya sekaligus kota perdagangan, dengan berbagai keanekaragaman adat, budaya, agama, flora dan fauna yang ada menjadikan wilayah Kota Pekalongan sebagai daerah yang cukup rawan konflik yang disebabkan permasalahan antar suku, agama maupun permasalahan perekonomian lainnya. Upaya cegah tangkal dan kewaspadaan dini konflik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan beberapa stake holder melalui kegiatan :

- a. Pengawasan Aliran Kepercayaan bersama Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Kementerian Agama Kota Pekalongan;
- b. Pengawasan Orang Asing bersama Imigrasi Kelas II Pematang Jaya;
- c. Rapat koordinasi secara berkala dengan unsur-unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Komunitas Intelijen Daerah dan Forum Koordinasi Umat Beragama;
- d. Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar dan memberikan sosialisasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kecamatan;
- e. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan partai politik- partai politik di Kota Pekalongan sebagai upaya pelaksanaan pendidikan politik dan dalam pemanfaatan hibah bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- f. Membangun komunikasi dengan generasi muda pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

Tantangan utama dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah meliputi keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kinerja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan. Keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama dalam memastikan adanya tenaga profesional yang mampu mengelola berbagai program secara efektif dan inovatif.

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dapat diarahkan pada strategi yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Pekalongan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan menetapkan dua tujuan utama dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Tujuan ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, daya saing, serta kontribusi bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai salah satu unsur yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kondusivitas wilayah di Kota Pekalongan perlu terus dipertahankan dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Segala potensi kerawanan sosial, potensi konflik sosial dan hal – hal yang menjurus kepada rusaknya kehidupan berbangsa perlu mendapatkan perhatian dan perubahan pelayanan inovasi berbasis digital, karena menjadi aspek kunci dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan Misi RPJMD tahun 2025 – 2029 yaitu :

- 1. Meningkatkan Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Tabel III.1 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	0	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7	6,75	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD (Indeks)	83,4	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	
		Tertanganinya konflik SARA di masyarakat	Persentase konflik SARA yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD (Indeks)	73,45	73,7	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	

Jika perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tersebut dihubungkan dengan Visi dan Misi Walikota maka terdapat 2 (dua) misi yang merupakan muara dari tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dirumuskan. Dua misi serta tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukungnya adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Misi ini didukung oleh tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatkan kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD

2. Misi 8 : Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah

Misi ini didukung oleh tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan masyarakat dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Kota Pekalongan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan menetapkan dua sasaran utama yang menjadi fokus dalam Renstra 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Tertanganinya konflik SARA di masyarakat

Pertama, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD, merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan program serta pelayanan publik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat terus meningkat. Akuntabilitas yang tinggi akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, Tertanganinya konflik SARA di masyarakat dengan indikator Persentase konflik SARA yang tertangani, menjadi sasaran yang bertujuan untuk menjaga kondisi Kota Pekalongan yang aman dan nyaman sekaligus menjaga kondusivitas wilayah di Kota Pekalongan.

Kedua Sasaran ini menjadi landasan utama dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan di bidang Kesatuan bangsa dan politik. Dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Pekalongan dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian indikator dari sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Untuk target masing - masing indikator sasaran yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Target Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline		Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	73,45	-	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05
2	dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas layanan publik	Tertanganinya konflik SARA di masyarakat	Persentase konflik SARA yang tertangani	-	-	100	100	100	100	100

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang jelas. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan guna mendukung pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkelanjutan.

Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Pekalongan dalam lima tahun ke depan menuntut adanya strategi yang tepat dan arah kebijakan yang terarah. Strategi pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam merancang dan mengimplementasikan program serta kegiatan strategis selama periode 2025-2029. Perumusan strategi didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Tabel III.3 Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan,	Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat	Implementasi ekonomi sirkular dalam rangka peningkatan taraf hidup Masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA dan penguatan	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana dan kondusivitas wilayah	Peningkatan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	media massa atau melalui komunitas		resiliensi bencana		berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama
Strategi Renstra OPD	Penguatan SDM Forum-Forum Strategis Masyarakat, Keluarga, Sekolah, Lembaga pendidikan dan Media massa	Penguatan sistem deteksi dini konflik berbasis masyarakat	Peningkatan taraf hidup masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan kondusivitas wilayah	Peningkatan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA

3.4 Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang disusun dalam dokumen ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia di bidang politik dan kesatuan bangsa, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang terukur, diharapkan pembangunan sektor ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Pekalongan secara menyeluruh.

Tabel III.4 Arah Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Keterangan
1.	Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas komunitas keagamaan, dan kebudayaan.	

kebangsaan dengan fondasi agama	Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat	
	Implementasi ekonomi sirkular dalam rangka peningkatan taraf hidup Masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA dan penguatan resiliensi bencana	
	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan resiliensi bencana dan kondusivitas wilayah	
	Peningkatan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama	

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan perlu merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada periode 2025-2029. Isu strategis ini mencerminkan aspek-aspek utama yang harus mendapatkan perhatian guna mewujudkan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan ke depan adalah:

1. Penguatan SDM Forum-Forum Strategis Masyarakat, Keluarga, Sekolah, Lembaga pendidikan dan Media massa
2. Penguatan sistem deteksi dini konflik berbasis masyarakat
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat untuk menurunkan potensi konflik SARA
4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan kondusivitas wilayah
5. Peningkatan kondusivitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA

Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan untuk lima tahun ke depan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terstruktur serta terukur. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan Misi RPJMD tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Meningkatkan Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan .

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan menetapkan dua sasaran utama yang menjadi fokus dalam Renstra 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Tertanganinya konflik SARA di masyarakat

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 1 Urusan, 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel IV.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target / Pagu										Kondisi Akhir
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3.350.833.000		2.420.836.000		2.420.836.000		2.620.836.000		2.420.836.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	0	100	100	1.518.386.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tercapainya pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	Persentase pemantapan pelaksanaan pembinaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100	100	100	1.518.386.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100	883.026.000	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	244	190	190	19.560.000	190	19.560.000	190	19.560.000	190	19.560.000	190	19.560.000	190
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1	1615	1340	233.900.000	1340	233.900.000	1340	233.900.000	1340	233.900.000	1340	233.900.000	1340
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	953	1104	100	731.340.000	100	95.980.000	100	95.980.000	100	95.980.000	100	95.980.000	100
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan	Dokumen	1	1	1	533.586.000	1	533.586.000	1	533.586.000	1	533.586.000	1	533.586.000	1

		Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka														
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya anggota Partai Politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik	Persentase anggota Partai Politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik	persen	0	85,71	87,76	1.187.320.000	89,8	889.400.000	91,84	889.400.000	93,88	1.089.400.000	95,92	889.400.000	95,92
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tercapainya pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang pendidikan politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	persen	100	100	100	1.187.320.000	100	889.400.000	100	889.400.000	100	1.089.400.000	100	889.400.000	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	854	600	150	830.980.000	150	830.980.000	150	830.980.000	500	1.030.980.000	150	830.980.000	150
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	680	630	180	356.340.000	180	58.420.000	180	58.420.000	180	58.420.000	180	58.420.000	180
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	persen	93,3	93,3	93,3	258.000.000	93,3	258.000.000	93,3	258.000.000	93,3	258.000.000	93,3	258.000.000	93,3

ORGANISASI KEMASYARAKATAN																
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	persen	100	100	100	258.000.000	100	258.000.000	100	258.000.000	100	258.000.000	100	258.000.000	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	401	235	250	258.000.000	250	258.000.000	250	258.000.000	250	258.000.000	250	258.000.000	250
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya masyarakat yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	NA	NA	90,43	98.197.000	91,3	101.480.000	92,17	101.480.000	93,04	101.480.000	93,91	101.480.000	93,91
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tercapainya pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	100	100	100	98.197.000	100	101.480.000	100	101.480.000	100	101.480.000	100	101.480.000	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	401	235	150	98.197.000	150	101.480.000	150	101.480.000	150	101.480.000	150	101.480.000	150
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya konflik sosial yang tertangani	Persentase konflik sosial yang tertangani	kali	NA	100	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan	persen	100	100	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100	288.930.000	100

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	nasional dan penanganan konflik sosial														
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	270	936	200	288.930.000	200	288.930.000	200	288.930.000	200	288.930.000	200	288.930.000	200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM							2.873.784.000		2.940.406.000		2.940.406.000		2.990.406.000		2.990.406.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	2.405.492.000	100	2.455.492.000	100	2.455.492.000	100	2.505.492.000	100	2.505.492.000	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	458.149.000	100	458.149.000	100	458.149.000	100	458.149.000	100	458.149.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	1.631.000	2	1.631.000	2	1.631.000	3	1.631.000	2	1.631.000	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.148.000	2	1.148.000	2	1.148.000	2	1.148.000	2	1.148.000	2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	71.758.329.000	100	73.258.329.000	100	73.258.329.000	100	74.758.329.000	100	74.758.329.000	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	15	2.353.774.000	15	2.403.774.000	15	2.403.774.000	15	2.453.774.000	15	2.453.774.000	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	35.875.000	12	35.875.000	12	35.875.000	12	35.875.000	12	35.875.000	12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1.064.000	1	1.064.000	1	1.064.000	1	1.064.000	1	1.064.000	1
	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	401.679.000	100	408.490.000	100	408.490.000	100	408.490.000	100	408.490.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	3.937.830.000	100	4.147.160.000	100	4.147.160.000	100	4.147.160.000	100	4.147.160.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	39.189.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	6.060.000	2	7.060.000	2	7.060.000	2	7.060.000	2	7.060.000	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	1.080.000	2	1.080.000	2	1.080.000	2	1.080.000	2	1.080.000	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	40	40	59.340.000	40	64.340.000	40	64.340.000	40	64.340.000	40	64.340.000	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	7.812.070.000	100	7.812.070.000	100	7.812.070.000	100	7.812.070.000	100	7.812.070.000	100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	730.000	4	730.000	4	730.000	4	730.000	4	730.000	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	57.900.000	12	57.900.000	12	57.900.000	12	57.900.000	12	57.900.000	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	208.730.000	12	208.730.000	12	208.730.000	12	208.730.000	12	208.730.000	12
	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	66.613.000	100	76.424.000	100	76.424.000	100	76.424.000	100	76.424.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	1.978.512.000	100	2.262.720.000	100	2.262.720.000	100	2.262.720.000	100	2.262.720.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	10	10	10	48.924.000	10	48.924.000	10	48.924.000	10	48.924.000	10	48.924.000	10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	9.939.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	17	17	17	7.750.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25

4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Tabel dibawah ini memuat keterkaitan antara masing-masing subkegiatan dengan kinerja yang diharapkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, target yang hendak dicapai pada tahun perencanaan, serta kontribusinya terhadap prioritas pembangunan daerah. Penyusunan daftar subkegiatan ini juga mempertimbangkan arah kebijakan daerah, potensi dan permasalahan sektoral, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

Tabel IV.2

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	8
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada etnis/suku/agama/ ormas dan LSM Kota Pekalongan	<p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,</p>	

			Berbangsa, dan Bernegara	
			Sub Kegiatan : Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam etika dan budaya politik	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Meningkatnya etnis/suku/agama/ ormas dan LSM yang memahami terntang	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya konflik sosial yang tertangani	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV.3 Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP OPD	indeks	73,45	73,7	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	
2	Persentase konflik SARA yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV.6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV.7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan demi meningkatkan kualitas pelayanan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan ini mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan hasil pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Keberhasilan implementasi Renstra ini membutuhkan komitmen, kerja sama, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun komunitas terkait. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala akan terus dilakukan agar strategi yang diterapkan tetap relevan dengan dinamika perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan berkewajiban melaksanakan program – program dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 dengan sebaik – baiknya;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029, Badan Kesbangpol diwajibkan menjabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan; dan
4. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2030 sesuai dengan Tupoksi Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, kesungguhan, tanggungjawab dan kerjasama yang kuat dari seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah tertuang dapat diwujudkan secara optimal, kondusivitas wilayah di Kota Pekalongan dapat terjaga dan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan kesatuan bangsa, memberikan manfaat yang optimal, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan



M. TAUFIQU ROCHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I

NIP. 19780107 199703 1 002